

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

# 2020



**KANTOR IMIGRASI  
KELAS II TPI TANJUNGPANDAN**

**Jalan Jenderal Sudirman Km 6.5 Perawas Tanjungpandan Belitung, 33413  
laman: [imigrasi.go.id](http://imigrasi.go.id), Email: [kanim.tanjungpandan@gmail.com](mailto:kanim.tanjungpandan@gmail.com)**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN**  
Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,5 Tanjungpandan  
Telp dan Fax (0719) 22268

Laman: imigrasi.go.id Email: [kanim\\_tanjungpandan@imigrasi.go.id](mailto:kanim_tanjungpandan@imigrasi.go.id)

30 November 2020

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi  
Up. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan  
di -  
Tempat

**SURAT - PENGANTAR**

**Nomor : W.7.IMI.IMI.2-PR.04.04-969**

NO.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Periode Tahun 2020.	1 ( Satu ) Berkas	Disampaikan untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Kepala Kantor

Dewanto Wisnu Raharjo  
NIP. 197206161993031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2020 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2020.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2020 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan LKJ Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2020 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan "hukum sebagai panglima" yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa pencapaian bahkan telah diapresiasi oleh institusi lain yang tentu saja mereka mempunyai indikator yang jelas dan terukur untuk menilai kinerja kita. Bahkan beberapa kali kita diuji dengan permasalahan yang harus kita selesaikan secara bijak dan tepat, kita pun mampu melewatinya dengan baik.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kantor Imigrasi II TPI Tanjungpandan Tahun 2020 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM dimasa yang akan datang.

  
Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas II TPI Tanjungpandan  
*Dewanto*  
Dewanto Wisnu Raharjo  
NIP. 197206161993031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	6
D. Permasalahan .....	7
E. Sistematika Laporan .....	9
BAB II PERENCANAAN KERJA .....	10
A. Visi, Misi Dan Tujuan .....	10
B. <i>Stakeholder Perspective</i> .....	11
C. <i>Customer Perspective</i> .....	11
D. <i>Internal Process</i> .....	11
E. <i>Learning And Growth Perpespective</i> .....	11
BAB III AKUNTABILITAS.....	14
A. Capaian Kinerja.....	14
B. Sasaran Strategi .....	15
C. Capaian Serapan Anggaran .....	41
BAB IV PENUTUP .....	30
4.1 Permasalahan .....	30
4.2 Upaya Perbaikan.....	30
LAMPIRAN.....	43

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan selama Tahun 2020, dan hubungannya dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2020 telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan visi dan misinya dengan sebaik-baiknya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.03- PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Departemen Kehakiman yang selanjutnya diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan merupakan UPT dibidang Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang keimigrasian dengan wilayah kerja meliputi Belitung dan Belitung Timur.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Kantor Imigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **a. SUB BAGIAN TATA USAHA**

#### **1. Urusan Kepegawaian**

- Menyusun Program dan Rencana Kerja Urusan Kepegawaian;
- Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Urusan Kepegawaian;
- Memeriksa konsep Surat Keputusan Kenalkan Gaji Berkala Tahun Anggaran 2020 sebelum didisposisikan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan;
- Memeriksa Konsep Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Pengusulan Kenaikan Pangkat, Pengusulan Mengikuti Ujian Dinas dan Pengusulan Pengisian Jabatan Struktural yang masih lowong;
- Memeriksa dan menyusun kelengkapan administrasi dan persuratan terkait Urusan Kepegawaian;
- Memeriksa dan mengevaluasi Laporan Bulanan Kehadiran Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan;
- Memeriksa arsip kepegawaian termasuk berkas kepegawaian perorangan;
- Melakukan penilaian dan evaluasi perilaku kerja bulanan dan kualitas realisasi SKP pada akhir tahun terhadap bawahan untuk menghasilkan output Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) Tahun 2020.

## **2. Urusan Keuangan**

- Menyusun Program Kerja, Rencana Kerja dan Kalender Kerja Keuangan Tahun Anggaran 2020 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan;
- Melaksanakan Elektronik Rekonsiliasi Laporan Keuangan (e-Rekon dan LK) dalam rangka Terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi;
- Mengecek dan mendisposisikan surat masuk dan surat keluar urusan keuangan pada SUMAKER;
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bahan penetapan pagu indikatif, Tahun Anggaran 2021 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan;
- Menyusun konsep usulan revisi DIPA, revial POK dan Revisi Halaman 3 DIPA Rencana Penarikan Dana;
- Menginput dan Menyusun Laporan bulanan Pengelolaan Keuangan pada Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) TA 2020 dan Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Operator Pengelola BMN;
- Mengisi data Capaian Kinerja Anggaran pada Realisasi Volume Keluaran dan Realisasi Indikator Keluarana Kegiatan TA 2020 pada Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu);
- Melakukan Pengujian atas permintaan pembayaran (SPP) dan menerbitkan permintaan pembayaran (SPM) dalam pengelolaan dana APBN TA 2020;
- Menyusun Laporan Pelaksanaan Anggaran ke dalam Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) TA 2020.

## **3. Urusan Umum**

- Menyusun bahan konsep program dan Rencana kerja Urusan Umum
- Melakukan rekonsiliasi Simak BMN dengan KPKNL;
- Memeriksa Administrasi Surat masuk dan Keluar;
- Menyusun arsip dan dokumen ketatausahaan;
- Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas kantor roda 2 dan 4;
- Melakukan pemeliharaan, pengamanan alat perlengkapan kantor.gedung kantor dan rumah dinas;

- Melakukan penghapusan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan;
- Menyusun daftar Inventaris kantor Ruangan (DIR);
- Memproses simak BMN Menginventarisir kebutuhan BMN;
- Melakukan pendistribusian dan pencatatan Blanko Dokumen Keimigrasian;
- Memeriksa Barang Persediaan;
- Melakukan penilaian perilaku kerja bulanan dan kualitas SKP realisasi pada akhir tahun terhadap satu orang staf dilingkungan Urusan Umum;
- Menyusun Laporan Bulan, Tengah tahun dan Laporan Kegiatan Kantor;
- Menyiapkan kompilasi program dan rencana kerja Kantor.

#### A. **BAGIAN SUBSTANTIF**

##### 1. **Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian**

- Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi Keimigrasian;
- Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data Keimigrasian
- Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi Keimigrasian;
- Penyiapan dan pengelolaan Informasi serta komunikasi publik Keimigrasian;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

##### 2. **Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian**

- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Melakukan penilaian jurnal harian, perilaku kerja bulanan dan SKP Realisasi untuk menghasilkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) akhir tahun terhadap satu orang pejabat struktural di Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keimigrasian di



Kantor Imigrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);

- Melaksanakan dan mengamankan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keimigrasian di Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Melakukan penolahaan pemberian dokumen DPRI kepada WNI;
- Melakukan penelahaan permohonan dan persetujuan pemberian ataupun perpanjangan Izin Tinggal Orang Asing (ITAS, ITAP, MERP, Alih Status, Affidavit, Dahsuskim dan SKIM);
- Melakukan tugas Pemeriksaan Keimigrasian (Immigration Clearance) keberangkatan dan kedatangan pesawat reguler di Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan;
- Melakukan tugas Pemeriksaan Keimigrasian (Immigration Clowranco) keberangkatan dan atau kedatangan kapal di Pelabuhan Tanjung Pandan;
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan Instansi / lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- 

**3. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian**

- Menyusun rencana kerja Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Memeriksa dan meneliti Laporan Kegiatan Sub Seksi Intelijen Keimigrasian;
- Memeriksa dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan dari Pelanggaran Keimigrasian serta meneliti dan menandatangani Berita Acara Pendapat;
- Memeriksa pelaksanaan atas tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran peraturan keimigrasian;
- Berkoordinasi dengan instansi terkait atas kegiatan kerja sama di bidang intelijen / pengawasan dan penindakan keimigrasian;
- Memeriksa dan meneliti Laporan Kegiatan Sub Seksi Penindakan Keimigrasian;
- Memberikan Penilaian Perilaku Kerja dan Kualitas / Mutu dari SKP Realisasi terhadap satu Kasubsi Penindakan, tiga orang staf di Sub Seksi Intelijen dan dua orang staf di Sub Seksi Penindakan Keimigrasian untuk menghasilkan PPKP Tahun 2020;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintah Pimpinan.

C. STRUKTUR ORGANISASI



## **D. PERMASALAHAN**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM selama tahun 2020, terdapat beberapa kendala yang dialami antara lain :

- 1 Bidang Fasilitatif
  - a. Bagian Keuangan - Tidak ada kendala
  - b. Bagian Kepegawaian
    - 1) Masih ada 3 (tiga) jabatan teknis yang kosong yaitu Kasubsi Teknologi Informasi, Kasubsi Komunikasi, dan Kasubsi Intelijen Keimigrasian yang berpengaruh pada kualitas pelayanan;
    - 2) Kondisi pegawai yang berjumlah 28 orang mengharuskan penambahan JFU bagian kepegawaian.
  - c. Bagian Urusan Umum
    - 1) Masih kurangnya kesadaran pegawai untuk aktif membuka aplikasi Sisumaker sehingga surat masuk terlambat diproses;
    - 2) Perlunya penambahan SDM dibagian umum khususnya untuk Pengelola dan operator BMN;
    - 3) Perlunya kontribusi seluruh pegawai dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana kantor.
2. Bidang Substantif
  - a. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
    - 1) Penggunaan APOA yang dilakukan oleh pihak hotel/ penginapan masih belum optimal dikarenakan belum semua hotel/penginapan menggunakan aplikasi tersebut secara online melainkan secara manual;
  - b. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
    - 1) Penumpukan arsip substantif (berkas WNI dan WNA)
    - 2) Jumlah berkas sudah terlalu banyak tidak berimbang dengan volume ruangan penyimpanan arsip yang terbatas sehingga petugas terkendala dalam penyusunan atau penyimpanan berkas ke ruang penyimpanan arsip;
    - 3) Layanan pengaduan masyarakat masih terbatas pada media elektronik dan belum tersedianya layanan aduan masyarakat melalui customer service (aduan langsung) sehingga layanan aduan belum berjalan maksimal.

c. Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian

- 1) Apabila ada gangguan jaringan dari pusat dapat menghambat pelayanan penerbitan SPRI;
- 2) Gangguan cuaca yang dikhawatirkan merusak jaringan dan peralatan kantor;
- 3) Pengawasan rutin terhadap TKI Nonprosedural;
- 4) perlunya penambahan booth asing Pelayanan Izin Tinggal.

## **E. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020**

Menjelaskan Visi, misi, dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020.

### **BAB II AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan, kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja. Indikator Kinerja Utama, rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM.

### **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capain kinerja tahun 2020.

## BAB II PERENCANAAN KERJA

### A. VISI, MISI DAN TUJUAN VISI DAN MISI



Tujuan :

- Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi.
- Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum.
- Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang professional.
- Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.
- Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

## **B. STAKEHOLDER PERSPECTIVE**

Pada perspektif ini sasaran diarahkan untuk lebih menekankan pada apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sasaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang masuk dalam pemetaan perspektif ini adalah Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian.

## **C. CUSTOMER PERSPECTIVE**

Pada perspektif ini, sasaran diarahkan dengan orientasi pada apa yang harus dapat kita lakukan untuk masyarakat. Sasaran yang masuk dalam pemetaan pada area ini adalah Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian

## **D. INTERNAL PROCESS**

Perspektif ini mengarahkan sasaran pada serangkaian aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat, dengan sasaran :

- Terwujudnya Manajemen Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang Transparan dan Akuntabel;
- Terwujudnya Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan;
- Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan.

## **E. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE**

Adalah yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi, dengan sasaran:

- Meningkatnya Kompetensi sumber daya manusia Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan;
- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan di Bidang Keimigrasian;
- Meningkatnya Kompetensi Aparatur Penegak Hukum dan Teknis Lainnya di Bidang Keimigrasian.

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dilakukan mekanisme penandatanganan perjanjian kinerja sesuai core bussines yang dijalankan Kementerian Hukum dan HAM.

Perjanjian tersebut berisi indikator kinerja utama yang menjadi alat bantu ukur mencapai indikator yang lebih besar lagi. Indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN**  
Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5, Tanjung Pandan Telepon (0719) 22268 Fax. (0719) 22268  
E-mail : kanim\_tanjungpandan@imigrasi.go.id

### FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Satker : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan  
Tahun : 2020  
Program : Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian  
Hasil (Outcome) : 1. Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian  
2. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian  
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian

No.	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	22 LHK
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelidikan Intelijen sebanyak : 12 LHK</li> <li>2. Operasi Mandiri sebanyak : 3 LHK</li> <li>3. Operasi Gabungan sebanyak : 2 LHK</li> <li>4. Pemberian TAK sebanyak : 2 LHK</li> <li>5. Penyelidikan sebanyak : 1 LHK</li> <li>6. Koordinasi Tim PORA sebanyak : 2 LHK</li> </ol>	
2			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	3.376 Orang
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing sebanyak : 203 Orang</li> <li>2. Penerbitan Dokumen Keimigrasian WNI sebanyak : 3.173 Orang</li> </ol>	
3			Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	631 Orang
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan		
5	Layanan Perkantoran	1 Layanan		



Kegiatan :

Penyelenggaraan Kegiatan Fungsi Pengkoordinasian,  
Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Kerja

Anggaran :

Rp. 4.766.282.000,-

PIHAK KEDUA  
Kepala Divisi Keimigrasian,



Eko Budianto, S.H.,M.Si.  
NIP. 19731116 199303 1 001



Kepala Kantor Imigrasi,

Eko Budianto Wisnu Raharjo, S.H.  
NIP. 19720616 1009303 1 001

## **BAB III AKUNTABILITAS**

### **A. CAPAIAN KINERJA**

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum, Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan Hal ini mengakibatkan kurang sempumanya kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik.

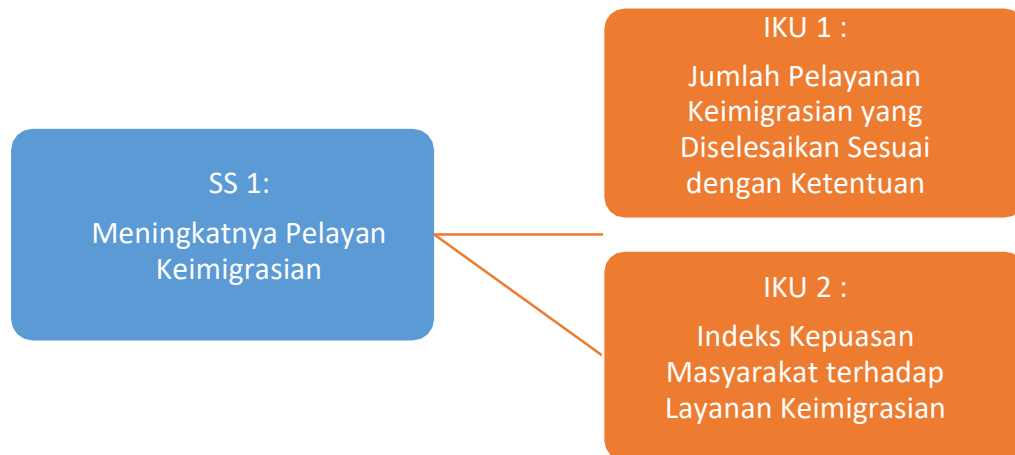
Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dibawah Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2020, telah melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan sasaran dan indikator capaiannya sebagai berikut:

## B. SASARAN STRATEGI

### SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama



Capaian Sasaran terbentuknya peraturan perundang-undangan, diukur melalui 2 indikator utama yaitu Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian.

#### a. **Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan berupa Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA**

Pencapaian indikator jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan ini diukur dari jumlah pelayanan keimigrasian yang dikerjakan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah penyelesaian pelayanan yang ditargetkan.

➤ **Perbandingan antara target dan realisasi Penerbitan Dokim bagi WNA**

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi		Uraian
		Jumlah Layanan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
1	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian berupa:  1 Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA	203 Orang	TW1	50	Orang	56	112%	Pelayanan melebihi target Bulan Januari s.d. Maret 2020
			TW2	101	Orang	67	66%	Pelayanan tidak mencapai target sehubungan dengan penghentian sementara pelayanan jasa keimigrasian terkait upaya pencegahan penyebaran covid19 sesuai surat edaran Ditjenim Nomor: IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) Di Lingkungan Kantor Imigrasi
			TW3	152	Orang	89	58.6%	Sesuai surat edaran Ditjenim Nomor: IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru, Kanim Tanjungpandan dalam hal pelayanan keimigrasian menerapkan jumlah booth yang dibuka 50% dari jumlah booth yang tersedia;
			TW4	203	Orang	113	56%	Realisasi Pelayanan tidak mencapai target sehubungan dengan merebaknya wabah covid19.

$$\frac{113 \text{ (realisasi Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan)}}{203 \text{ (target Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan)}} \times 100 \% = 56 \%$$

Analisis :

Pada tahun 2020, jumlah pelayanan keimigrasian **TIDAK** mencapai dari target yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2020. Merembaknya virus covid19 yang menyebabkan munculnya instruksi pemerintah untuk membatasi aktivitas perkantoran maupun jasa pelayanan keimigrasian bagi masyarakat yang ingin bepergian ke Luar Negeri. Pelayanan keimigrasian yang diselesaikan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan antara lain pelayanan paspor, Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian untuk crew dan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik laut ataupun udara, dan pelayanan izin tinggal bagi orang asing. Total jumlah pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing selama periode TA 2020 yang telah diselesaikan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebanyak **113** atau **56%** terealisasi dari target yang telah direncanakan.

Beberapa faktor yang menyebabkan **TIDAK** tercapainya realisasi target pelayanan keimigrasian yang telah diselesaikan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan antara lain:

1. Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor: IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) Di Lingkungan Kantor Imigrasi, Kanim Tanjungpandan melakukan langkah-langkah:
  - a. Memberikan informasi kepada Orang Asing untuk tidak perlu mengajukan permohonan izin tinggal keadaan terpaksa karena apabila izin tinggal telah melewati batas waktu (overstay) akan diberikan biaya beban dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) merujuk kepada Pasal 5 ayat (6) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - b. Orang Asing yang diberikan biaya beban nol rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia setelah tanggal 5 Februari 2020. membatasi pelayanan paspor dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak untuk permohonan bagi orang yang tidak bisa ditunda penanganannya

atas rujukan dokter dan orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda.

2. Sesuai Permenkumham RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Kemenkumham dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru diterbitkan sebagai langkah pemulihan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan ditengah situasi sulit akibat pandemi covid-19.
3. Sesuai surat edaran Ditjenim Nomor: IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru.

➤ **Perbandingan Antara Tahun 2019 Dengan Tahun 2020**

Indikator	2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian berupa:	101	224	221%	203	113	56%
➤ Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA						

➤ **Laporan Data Statistik Penerbitan Dokim WNA antara Tahun 2019 dan 2020**

**LAPORAN STATISTIK PENERBITAN IZIN KEIMIGRASIAN  
KANIM KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
Periode Tahun 2019**

DOKIM	Bulan (Pemohon - 2019)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
ITK	0	0	0	0	19	4	14	1	7	19	10	3
ITAS	0	0	0	0	5	2	6	6	3	5	3	3
ITAP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1
AFFIDAVIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alih Status ITK ke ITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alih Status ITAS ke ITAP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>7</b>

**LAPORAN STATISTIK PENERBITAN IZIN KEIMIGRASIAN  
KANIM KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
Periode Tahun 2020**

DOKIM	Bulan (Pemohon - 2020)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
ITK	8	14	16	7	0	0	2	5	4	10	1	0
ITAS	4	8	3	0	2	1	7	5	3	3	3	0
ITAP	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
AFFIDAVIT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Alih Status ITK ke ITAS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Alih Status ITAS ke ITAP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

**b. Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan berupa Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI**

Pencapaian indikator jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan ini diukur dari jumlah pelayanan keimigrasian yang dikerjakan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah penyelesaian pelayanan yang ditargetkan.

➤ **Perbandingan antara target dan realisasi Penerbitan Dokim bagi WNI**

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi		Uraian
		Jumlah Layanan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	%	
1	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian berupa:							
	1 Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI	3173 Orang	TW1	793	Orang	971	122%	Pelayanan melebihi target Bulan Januari s.d. Maret 2020
			TW2	1586	Orang	995	63%	Pelayanan tidak mencapai target sehubungan dengan penghentian sementara pelayanan jasa keimigrasian terkait upaya pencegahan penyebaran covid19
			TW3	2379	Orang	1078	45%	Realisasi Pelayanan tidak mencapai target sehubungan dengan Pelayanan paspor New Normal sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru dengan kuota Layanan dibatasi hanya 50% dari kuota normal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;

			TW4	3173	Orang	1124	35%	Realisasi Pelayanan tidak mencapai target sehubungan dengan merebaknya wabah covid19.
--	--	--	-----	------	-------	------	-----	---

Analisis:

1. Pada tahun 2020, jumlah pelayanan keimigrasian **TIDAK** mencapai dari target yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2020. Sehubungan dengan merebaknya virus corona (covid19) di Indonesia dan dunia, sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran wabah virus tersebut yang sangat rentan terjadi di area publik, Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan surat edaran Surat Edaran Nomor : IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Kantor Imigrasi. Kanim Tanjungpandan membatasi pelayanan paspor dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak untuk permohonan bagi orang yang tidak bisa ditunda penanganannya atas rujukan dokter dan orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda;
2. Sehubungan dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait darurat covid19 yang berarti bagi pemohon jasa keimigrasian harus menunda bepergian keluar negeri pada masa darurat covid19;
3. Dalam rangka mendukung keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di bidang Keimigrasian agar dapat beradaptasi dengan tatanan normal baru yang tetap produktif dan mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Direktur Jenderal Imigrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam Masa Tatanan Normal Baru. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam Masa Tatanan Normal Baru, Kanim Tanjungpandan melaksanakan **“EAZY PASPOR”** sebuah layanan urus paspor kolektif yang dilaksanakan diluar kantor Imigrasi dan dilokasi pemohon layanan dengan menggunakan unit paspor mobile. Kanim Tanjungpandan mengadakan Layanan Eazy Paspur di



- Kantor PT. PLN UP3 Belitung tanggal 13 Juli 2020 dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tanjungpandan;
4. sehubungan dengan telah dilaksanakan kegiatan Pelayanan Paspor Simpatik kepada masyarakat yang merupakan Target Kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020, berikut disampaikan data statistik pelayanan paspor simpatik selama tahun 2020 dengan data sebagai berikut:

**KEGIATAN LAYANAN PASPOR EAZY PASSPORT DAN PASPOR SIMPATIK  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN**

**a. Layanan Eazy Passport**

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN	LOKASI KEGIATAN	JENIS PERMOHONAN				TOTAL
			BARU		PENGANTIAN Habis Berlaku		
			LK	PR	LK	PR	
1.	13 Juli 2020	Kantor PT. PLN UP3 Belitung	4	7	0	3	14
2.	11 Agustus 2020	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tanjung Pandan	5	3	1	0	9
<b>TOTAL</b>			<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>23</b>

**b. Layanan Paspor Simpatik**

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS PERMOHONAN				TOTAL
		BARU		PENGANTIAN Habis Berlaku		
		LK	PR	LK	PR	
1.	04 Januari 2020	11	14	1	2	28
2.	11 Januari 2020	7	7	4	5	23
3.	18 Januari 2020	7	12	1	1	21
4.	25 Januari 2020	6	5	1	2	14
5.	29 Februari 2020	3	2	0	0	5
6.	18 Juli 2020	0	0	0	1	1
7.	07 November 2020	1	1	0	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>94</b>

5. Salah satu upaya yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Kanim Tanjungpandan menghadirkan Inovasi Layanan **MENDANAU** (Melayani antar Desa dan Pulau). Sebagai daerah kepulauan, Belitung memiliki sejumlah pulau kecil yang masyarakatnya juga merupakan

poengguna layanan keimigrasian. Selama ini terbatasnya akses transportasi kerap menjadi kendala bagi masyarakat pulau. Untuk Kanim Tanjungpandan menghadirkan layanan **MENDANAU**. Melalui inovasi ini, masyarakat yang bertempat tinggal dipulau tidak perlu mendatangi Kanim, karena petugas Kanim Tanjungpandan akan mendatangi langsung kepulau tersebut. Kemudahan akan dirasakan langsung oleh pemohon bahkan saat prosesnya telah selesai dimana paspor tersebut akan diantar atau dikirm langsung kepada yang bersangkutan. Masyarakat desa pulau Seliu, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung berkesempatan menikmati layanan **MENDANAU** dari Kanim Tanjungpandan. layanan Imigrasi Masuk Desa.

➤ **Perbandingan Penerbitan Dokim WNI antara Tahun 2019 dan 2020**

Indikator	2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian berupa:	2585	3445	133%	3173	1124	35%
➤ Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI						

➤ **Laporan Data Statistik Penerbitan Dokumen WNI Tahun 2019 Dan 2020**

LAPORAN STATISTIK PERMOHONAN PASPOR  
KANIM KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
Periode Tahun 2019

JENIS PERMOHONAN	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	Grand Total
BARU	0	132	135	185	180	218	314	251	240	1548
GANTI (EKS PEMEGANG PASPOR 48 HALAMAN/24 HALAMAN /SPLP)	0	0	4	1	0	1	0	1	0	7
GANTI (HABIS MASA BERLAKU)	1	87	65	95	96	92	127	101	98	766
GANTI (HILANG DAN HABIS MASA BERLAKU)	0	1	0	0	2	1	1	4	0	9
GANTI (HILANG)	0	1	1	2	2	1	2	0	3	12
GANTI (PENUH / HALAMAN PENUH)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
GANTI (RUSAK)	0	1	0	0	0	1	1	1	0	4
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>222</b>	<b>212</b>	<b>263</b>	<b>280</b>	<b>314</b>	<b>445</b>	<b>368</b>	<b>342</b>	<b>2447</b>

LAPORAN STATISTIK PERMOHONAN PASPOR  
KANIM KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
Periode Tahun 2020

JENIS PERMOHONAN	JANUARI	FEBUARI	MARET	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	Grand Total
BARU	408	223	72	7	17	20	14	7	16	784
GANTI (HABIS MASA BERLAKU)	145	69	43	12	15	9	5	9	13	320
GANTI (HILANG)	3	3	4	0	0	0	1	0	1	12
GANTI (PENUH / HALAMAN PENUH)	1	0	0	4	2	0	0	0	0	7
GANTI (RUSAK)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>Total</b>	<b>567</b>	<b>295</b>	<b>119</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>1124</b>

**c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian**

Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian ini diukur dari jumlah pelayanan keimigrasian yang dikerjakan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah penyelesaian pelayanan yang ditargetkan.

Berikut hasil Indeks Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan periode Januari s.d Oktober 2020 yang ditampilkan dalam bentuk tabel.




 Tanjungpandan, 05 Februari 2020  
 a.n. Kepala  
 Kasi TIKM  
  
 Hendra Adhwiwowo, A.Md.Ir., S.H  
 NIP. 198309232002121001

**LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
PERIODE BULAN FEBRUARI 2020**



NO	PERTANYAAN	SANGAT BAGUS	BAGUS	CUKUP	BURUK	SANGAT BURUK
1	Prosedur Pelayanan	274	20	-	-	-
2	Persyaratan Pelayanan	265	29	-	-	-
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	266	28	-	-	-
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	277	17	-	-	-
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	264	30	-	-	-
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	262	32	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan	275	19	-	-	-
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	274	20	-	-	-
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	280	14	-	-	-
10	Kepastian Jadwal Pelayanan	269	25	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2706</b>	<b>234</b>			
	<b>PERSENTASE TOTAL</b>	<b>92,04%</b>	<b>7,96%</b>			
	<b>TOTAL RESPONDEN</b>	<b>: 294 Orang</b>				

Tanjungpandan, 05 Maret 2020  
a.n. Kepala  
Kasi TIKM



Hendra Adhiwibowo, A.Md.Im., S.H  
NIP. 198309232002121001

LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
PERIODE BULAN MARET 2020



NO	PERTANYAAN	SANGAT BAGUS	BAGUS	CUKUP	BURUK	SANGAT BURUK
1	Prosedur Pelayanan	107	10	-	-	-
2	Persyaratan Pelayanan	98	19	-	-	-
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	105	12	-	-	-
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	111	6	-	-	-
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	112	5	-	-	-
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	109	8	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan	108	9	-	-	-
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	100	17	-	-	-
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	112	5	-	-	-
10	Kepastian Jadwal Pelayanan	101	16	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1063</b>	<b>107</b>	-	-	-
	<b>PERSENTASE TOTAL</b>	<b>90,85%</b>	<b>9,15%</b>			
	<b>TOTAL RESPONDEN</b>	<b>: 117 Orang</b>				



Tanjungpandan, 5 April 2020

a.n. Kepala  
Kasi TIKIM

*(Signature)*  
Hendra Adhiwibowo, A.Md.Im., S.H

NIP. 198309232002121001

LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
PERIODE BULAN APRIL 2020



NO	PERTANYAAN	SANGAT BAGUS	BAGUS	CUKUP	BURUK	SANGAT BURUK
1	Prosedur Pelayanan	0	0	-	-	-
2	Persyaratan Pelayanan	0	0	-	-	-
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	0	0	-	-	-
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	0	0	-	-	-
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	0	0	-	-	-
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	0	0	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan	0	0	-	-	-
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	0	0	-	-	-
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	0	0	-	-	-
10	Kepastian Jadwal Pelayanan	0	0	-	-	-
	TOTAL	0	0	-	-	-
	PERSENTASE TOTAL	0%	0%			
	TOTAL RESPONDEN	: 0 Orang ( NIHIL)				



Tanjungpandan, 5 Mei 2020

d.n. Kepala  
Kasi TIKIM

*(Signature)*  
Hendra Adhiwibowo, A.Md.Im., S.H

NIP. 198309232002121001

LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
PERIODE BULAN MEI 2020



NO	PERTANYAAN	SANGAT BAGUS	BAGUS	CUKUP	BURUK	SANGAT BURUK
1	Prosedur Pelayanan	0	0	-	-	-
2	Persyaratan Pelayanan	0	0	-	-	-
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	0	0	-	-	-
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	0	0	-	-	-
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	0	0	-	-	-
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	0	0	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan	0	0	-	-	-
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	0	0	-	-	-
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	0	0	-	-	-
10	Kepastian Jadwal Pelayanan	0	0	-	-	-
	TOTAL	0	0	-	-	-
	PERSENTASE TOTAL	0%	0%			
	TOTAL RESPONDEN	: 0 Orang ( NIHL)				

Tanjungpandan, 5 Juni 2020  
a.n. Kepala  
Kasi TIKM



Hendra Adhiwibowo, A.Md.Im., S.H  
NIP. 198309232002121001

LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
PERIODE BULAN JUNI 2020



NO	PERTANYAAN	SANGAT BAGUS	BAGUS	CUKUP	BURUK	SANGAT BURUK
1	Prosedur Pelayanan	22	2	-	-	-
2	Persyaratan Pelayanan	23	1	-	-	-
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	23	1	-	-	-
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	22	2	-	-	-
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	21	3	-	-	-
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	22	2	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan	21	3	-	-	-
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	22	2	-	-	-
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	23	1	-	-	-
10	Kepastian Jadwal Pelayanan	22	2	-	-	-
	TOTAL	221	19	-	-	-
	PERSENTASE TOTAL	92,08%	7,92%			
	TOTAL RESPONDEN	: 24 Orang				

Tanjungpandan, 6 Juli 2020  
s.d. Kepala  
Kasi TIKIM

  
Hendra Adhwinibowo, A.Md.Im., S.H  
NIP. 198309232002121001



LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
PERIODE BULAN JULI 2020



NO	PERTANYAAN	SANGAT BAGUS	BAGUS	CUKUP	BURUK	SANGAT BURUK
1	Prosedur Pelayanan	31	4	-	-	-
2	Persyaratan Pelayanan	30	4	-	-	-
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	30	4	-	-	-
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	29	5	-	-	-
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	30	4	-	-	-
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	31	3	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan	32	2	-	-	-
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	32	2	-	-	-
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	31	3	-	-	-
10	Kepastian Jadwal Pelayanan	31	3	-	-	-
	TOTAL	307	34	-	-	-
	PERSENTASE TOTAL	90,03%	9,97%			
	TOTAL RESPONDEN	: 34 Orang				

Tanjungpandan, 10 Agustus 2020  
a.n. Kepala  
Kasi TIKM



Hendra Adhiwibowo, A.Md.Im., S.H  
NIP. 198308232002121001



LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
PERIODE BULAN AGUSTUS 2020



NO	PERTANYAAN	SANGAT BAGUS	BAGUS	CUKUP	BURUK	SANGAT BURUK
1	Prosedur Pelayanan	27	2	-	-	-
2	Persyaratan Pelayanan	26	3	-	-	-
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	26	3	-	-	-
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	27	2	-	-	-
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	25	4	-	-	-
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	27	2	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan	26	3	-	-	-
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	25	4	-	-	-
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	26	3	-	-	-
10	Kepastian Jadwal Pelayanan	27	2	-	-	-
	TOTAL	262	28	-	-	-
	PERSENTASE TOTAL	90,34%	9,66%			
	TOTAL RESPONDEN	: 29 Orang				



Tanjungpandan, 7 September 2020

a.n. Kepala  
Kasi TIQM

Hendra Adhiwibowo, A.Md.Im., S.H  
NIP. 196309232002121001

LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
PERIODE BULAN SEPTEMBER 2020



NO	PERTANYAAN	SANGAT BAGUS	BAGUS	CUKUP	BURUK	SANGAT BURUK
1	Prosedur Pelayanan	18	2	-	-	-
2	Persyaratan Pelayanan	19	1	-	-	-
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	18	2	-	-	-
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	17	3	-	-	-
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	19	1	-	-	-
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	17	3	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan	17	3	-	-	-
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	19	1	-	-	-
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	18	2	-	-	-
10	Kepastian Jadwal Pelayanan	19	1	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>181</b>	<b>19</b>			
	<b>PERSENTASE TOTAL</b>	<b>90,50%</b>	<b>9,50%</b>			
	<b>TOTAL RESPONDEN</b>	<b>: 20 Orang</b>				

Tanjungpandan, 9 Oktober 2020  
a.n. Kepala  
Kasi TRKM



Hendra Adhiwibowo, A.Md.Im., S.H  
NIP. 198309232002121001

LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
PERIODE BULAN OKTOBER 2020



NO	PERTANYAAN	SANGAT BAGUS	BAGUS	CUKUP	BURUK	SANGAT BURUK
1	Prosedur Pelayanan	15	1	-	-	-
2	Persyaratan Pelayanan	15	1	-	-	-
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	15	1	-	-	-
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	14	2	-	-	-
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	14	2	-	-	-
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	15	1	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan	14	2	-	-	-
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	13	3	-	-	-
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	15	1	-	-	-
10	Kepastian Jadwal Pelayanan	15	1	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>145</b>	<b>15</b>			
	<b>PERSENTASE TOTAL</b>	<b>90,63%</b>	<b>9,38%</b>			
	<b>TOTAL RESPONDEN</b>	<b>: 16 Orang</b>				

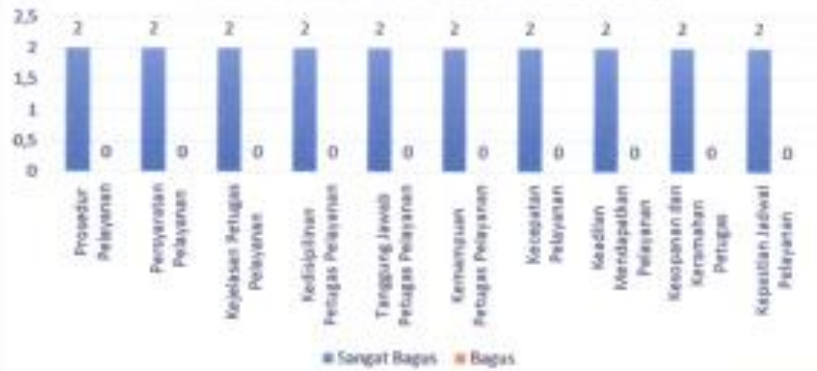
Tanjungpandan, 5 November 2020  
a.n. Kepala  
Kasi TIKIM



Hendra Adhiwibowo, A.Md.Im., S.H  
NIP. 198309232002121001

LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
PELAYANAN PASPOR SIMPATIK

PASPOR SIMPATIK 7 NOVEMBER 2020



NO	PERTANYAAN	SANGAT BAGUS	BAGUS	CUKUP	BURUK	SANGAT BURUK
1	Prosedur Pelayanan	2	0	-	-	-
2	Persyaratan Pelayanan	2	0	-	-	-
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	2	0	-	-	-
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	2	0	-	-	-
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	2	0	-	-	-
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	2	0	-	-	-
7	Kecepatan Pelayanan	2	0	-	-	-
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	2	0	-	-	-
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	2	0	-	-	-
10	Kepastian Jadwal Pelayanan	2	0	-	-	-
	TOTAL	2	0	-	-	-
	PERSENTASE TOTAL	100%	0%			
	TOTAL RESPONDEN	: 2 Orang				

Tanjungpandan, 8 November 2020  
a.n. Kepala  
Kasi TIKIM  
  
Hendra Adhiwibowo, A.Md.Im., S.H  
NIP. 198309232002121001



Analisis :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian diukur dari survey yang dilakukan oleh setiap petugas ke setiap pemohon yang mendapatkan pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan.

Adapun jenis pertanyaan yang disampaikan adalah:

1. Prosedur Pelayanan;
2. Persyaratan Pelayanan;
3. Kejelasan Petugas Pelayanan;
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan;
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan;
6. Kemampuan Petugas Pelayanan;
7. Kecepatan Pelayanan;
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan;
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas;
10. Kepastian Jadwal Pelayanan.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan aplikasi IKM, pengisian kuesioner, observasi dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang objektif dan akuntabel.

Selain pernyataan-pernyataan sebagai nilai indikator unsur pelayanan, survey juga memuat pertanyaan kualitatif dimana pemohon / target responden dapat mengutarakan secara luas mengenai pendapatnya tentang pelayanan dan juga menyampaikan kritik dan sarannya untuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan. Diharapkan pada kolom pertanyaan tersebut responden tidak terpaku hanya pada pernyataan yang telah disiapkan tetapi juga dapat menyampaikan saran perbaikan yang nantinya akan sangat berguna dalam melakukan perbaikan ataupun menciptakan inovasi layanan.

Pada tahun 2020, pelaksanaan kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan telah dilakukan dan diperoleh nilai rata-rata serta nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91.8 dari nilai maksimal 100, dengan kategori (A) Sangat Baik.

Penilaian kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan dapat diperoleh dengan mengelompokkan nilai konversi SKM atau konversi SKM per unsur sebagaimana table berikut :

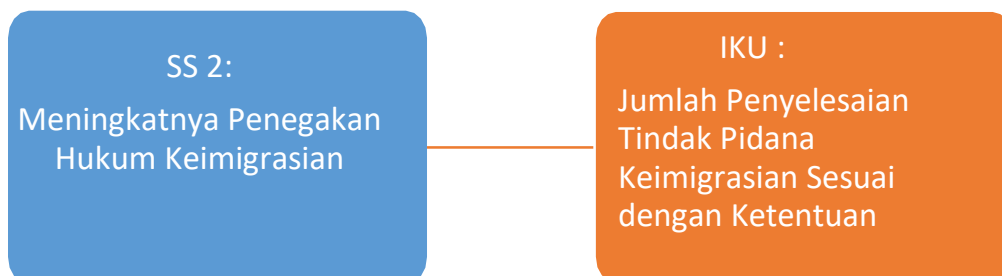
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik
4	3.5324-4.00	88.31-100.0	A	Sangat Baik

Berdasarkan data dari responden yang telah diterima, secara umum dapat dikatakan kualitas pelayanan public yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sudah berjalan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91.8 yang dalam skala Indeks Kepuasan Masyarakat termasuk dalam kategori sangat baik. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan terus melakukan perbaikan terhadap layanan, saranan dan prasarana serta melakukan inovasi layanan dengan menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat .

## SASARAN STRATEGIS 2

### Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian

#### a. Capaian Indikator Kinerja Utama



Capaian Sasaran Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian diukur melalui indikator utama yaitu Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan.

➤ Perbandingan antara target dan realisasi

INDIKATOR KINERJA		TARGET			REALISASI		URAIAN	
NO		WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	( % )		
1	Jumlah Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian • Penyelidikan Intelijen	12 LHK	TW1	3	LHK	2	67%	
			TW2	6	LHK	5	83%	
			TW3	9	LHK	7	78%	
			TW4	12	LHK	11	<b>92%</b>	<b>Hampir Mencapai 100%</b>
	• Operasi Mandiri	3 LHK	TW1	1	LHK	0	0%	
			TW2	2	LHK	1	50%	
			TW3	0	LHK	0	0%	
			TW4	3	LHK	3	<b>100%</b>	<b>Operasi Mandiri Mencapai 100%</b>
	• Operasi Gabungan	2 LHK	TW1	1	LHK	1	100%	
			TW2	0	LHK	0	0	
			TW3	0	LHK	0	0	
			TW4	2	LHK	2	<b>100%</b>	<b>Operasi Gabungan Mencapai 100%</b>
	• Pemberian TAK	2 LHK	TW1	0	LHK	0	0%	
			TW2	0	LHK	0	0%	
			TW3	1	LHK	0	0%	
			TW4	2	LHK	0	<b>0%</b>	<b>NIHIL</b>
	• Penyidikan	1 LHK	TW1	0	LHK	0	0%	
			TW2	0	LHK	0	0%	
			TW3	0	LHK	0	0%	
			TW4	1	LHK	0	<b>0%</b>	<b>NIHIL</b>
• TIMPORA	2 LHK	TW1	1	LHK	1	100%		
		TW2	0	LHK	0	0		
		TW3	2	LHK	2	<b>100%</b>	<b>TIMPORA 100%</b>	
		TW4	0	LHK	0	0		

18 (realisasi Jumlah Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian)

22 (Target Jumlah Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian)

$$\frac{18}{22} \times 100 \% = 81 \%$$



Analisis :

1. Selama tahun 2020, Kanim Tanjungpandan tidak menemukan penyalahgunaan dokumen keimigrasian dan lainnya dan sesuai dengan Sesuai surat edaran Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, orang asing yang tinggal di Indonesia yang telah memperoleh izin tinggal keadaan terpaksa dapat memperpanjang izin tinggal kunjungan atau mengajukan Persetujuan Visa dan melapor di Kantor Imigrasi Setempat;
2. Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian dalam hal pemberian TAK dan penyidikan tidak ditemukan pelanggaran secara hukum keimigrasian di wilayah kerja kanim Tanjungpandan;
3. Sehubungan dengan Penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian operasi Intelijen yang berbasis anggaran, kegiatan tersebut belum berjalan maksimal diawal tahun dikarenakan dana yang belum turun.

### C. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target/ Volume	Realisai Volume	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasia, Pelayanan dan Penegakkan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	22 LHK	18 LHK	501.914.000	288.113.489	57,40
2	Hukum Keimigrasian di Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	3.376 Dokumen	1.124 Dokumen	586.893.000	208.007.205	35,44
3		Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	631 Orang	946 Orang	246.650.000	164.556.300	66,72
4		Layanan Dokumen Manajemen Satker	1 Layanan	-	638.600.000	377.002.338	59,04
5		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	2.721.278.000	2.396.980.345	88,08
Jumlah					4.695.335.000	3.434.659.677	73,15
					0		

#### 1. Keterangan:

Adanya Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-97/PB/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TAHAP V Tahun Anggaran 2020. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dengan Pagu PNBP sebesar **Rp. 1.974.057.000,-** Maksimum Pencairan (MP) sampai dengan Tahap V Tahun 2020 sebesar **Rp. 1.184.434.200,-** sehingga yang tidak bisa di realisasikan/dcairkan sampai Tahap V sebesar **Rp. 789.622.800,-** sehingga Anggaran yang bisa di serap/direalisasikan dari Maksimum Pencairan (MP) Tahap V sebesar **Rp. 1.184.434.200,-**.

*Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja adalah :*

*Capaian peningkatan realisasi pendapatan pengelolaan keuangan dan asset = (Jumlah realisasi pendapatan/target pendapatan x 100%) + (jumlah realisasi anggaran/target anggaran x 100%) + (Jumlah penerbitan dokumen Negara*

Dengan memperhatikan jumlah prosentase pencapaian kinerja sasaran strategis Capaian peningkatan realisasi penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan untuk Triwulan IV Per 28 November 2020 sebesar 73,15 % . pengumpulan Data Capaian Kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan menggunakan sistem **e-Monev** dan **e-SAKIP dan OmSpan**.

## **2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan**

Tolak ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara, yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan adalah Capaian peningkatan realisasi pendapatan pengelolaan keuangan dan asset Negara.

## **3. Realisasi Anggaran**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belanja untuk mendukung semua kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun Anggaran 2020 setelah Revisi Anggaran adalah sebesar **Rp. 4.695.335.000,-** (*empat milyar enam ratus*

sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dari total belanja tersebut terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp. 2.721.278.000,-** dan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp. 1.974.057.000,-**, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan telah dapat mempertanggungjawabkan untuk Triwulan IV per 28 November 2020 sebesar **73,15 %** atau telah terealisasi sebesar **Rp. 3.434.659.677,-** dari pagu DIPA TA 2020 sebesar **Rp. 4.766.282.000,-**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Laporan Keuangan program Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan untuk untuk Triwulan IV TA 2020 adalah sebagai berikut :

**a. Laporan Pagu Dana Per Kegiatan (Per 28 November 2020)**

5254- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

No	Kode>Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa
1	5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah	4,695,335,000	434,659,677	73.15%	1,260,675,323
Grand Total :		4,695,335,000	3,434,659,677	73.15%	1,260,675,323

**b. Laporan Pagu Dana Per Output (Per 28 November TA 2020)**

5254- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

No	Kode>Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa Dana
1	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	501,914,000	288,113,489	57.40%	213,800,511
2	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	586,893,000	208,007,205	35.44%	378,885,795
3	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	246,650,000	164,556,300	66.72%	82,093,700
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	638,600,000	377,002,338	59.04%	261,597,662

5	Layanan Perkantoran	2,721,278,000	2.396,980,345	88.08%	324,297,655
Jumlah		4,695,335,000	3,434,959,677	73.15%	1,260,675,323

**c. Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja (Per 28 November TA 2020)**

5254- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	51-Belanja Pegawai	1,733,278,000	1.567,997,282	90.46%	165,280,718
2	52-Belanja Barang	2,962,057,000	1.866,662,395	63.02%	1,095,394,605
3	53-Belanja Modal	-	-	-	-
Grand Total :		<b>4,695,335,000</b>	<b>3,434,659,677</b>	<b>73.15%</b>	<b>1,260,675,323</b>

**d. Laporan Pagu Dana Per Sumber Dana (Per 28 November TA 2020)**

5254- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	RUPIAH MURNI	2,721,278,000	2.396,980,345	88.08%	324,297,655
2	PNBP	1,974,057,000	1.037,679,332	52.57%	936,377,668
Grand Total :		<b>4,695,335,000</b>	<b>3,434,659,677</b>	<b>73.15%</b>	<b>1,280,675,323</b>

Keterangan :

Pagu dana PNBP belum dipotong MP Tahap IV sebesar Rp. 789.622.800,- sehingga persentase pada belanja PNBP sangat kecil.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan pencapaian sasaran penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jawaban dari visi, misi dan strategis instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari analisis terhadap Indikator **Kinerja Utama (IKU)** yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan tercapai sampai dengan Triwulan IV sebesar 73,15% . Adapun penyebab penyerapan kurang dari target Disburseemen Plant yang sudah disepakati dikarenakan adanya pandemic Covid-19 dan adanya pemotongan anggaran pada pagu dana PNBP sebesar **Rp. 789.622.800,-** sehingga tidak mencapai target yang telah disepakati.

Perhitungan realisasi setelah adanya pemotongan pagu dana PNBP sebesar Rp. 789.622.800 dari Maksimum Pencairan Tahap IV dan V menjadikan Pagu Anggaran berubah dari Rp. 4.695.355.000,- **menjadi** Rp. 3.976.659.200,- sehingga ditemukan persentase dari realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	RUPIAH MURNI	2,721,278,000	2.396,980,345	88.08%	324,297,655
2	PNBP (Rp.1.974.057.000,-)	1,184,434,200	1.037,679,332	87.60%	146,754,868
Grand Total :		<b>3,905,712,200</b>	<b>3,434,659,677</b>	<b>87.93%</b>	<b>471,052,523</b>

Dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan terus berusaha melaksanakan fungsi dan ketugasan dengan sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan secara optimal melalui peran, fungsi dan ketugasan pengelolaan keuangan daerah. Pencapaian kinerja yang ada mungkin belum memuaskan semua pihak, namun demikian kinerja tersebut adalah kinerja terbaik yang dapat kami sajikan dengan segala keterbatasan yang ada. Kondisi ini akan menjadi

perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan dimasa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Umpan balik (*feed back*) atas segala yang kami sajikan dan saran-saran sangat kami harapkan guna peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas II TPI Tanjungpandan

*Dewanto*  
Dewanto Wisnu Raharjo  
NIP. 197206161993031001

# LAMPIRAN



# E-PERFORMANCE

## SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN 2020

UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN

Tampilkan + Tambah

#### PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2020 KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		WAKTU PENYELESAIAN	TARGET			REALISASI	LAMPIRAN	CATATAN MONITORING	BOBOT	BSC SCORE%								
				SELURUH	MASUK		JUMLAH	SAJUAN	JUMLAH						(%)							
1.	Penyenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penggerak Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	1. Jumlah Penyenggaraan Penggerakan Hukum Keimigrasian berupa Penyelidikan Intelektual	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	12 LHK Triwulan IV	TW1	3	LHK	2	67	Penyelidikan Intelektual Bulan Januari, Februari dan Maret	- 87Operasi Intelektual Bulan Juli dan Agustus 2020, compressed.pdf	0	0							
							TW2	6	LHK	5	83	Penyelidikan untuk bulan April, Mei dan Juni										
							TW3	9	LHK	7	78	Penambahan 2 kali kegiatan operasi Intelektual bulan Juli dan Agustus 2020										
							TW4	12	LHK	11	92	Penambahan 4 kegiatan penyelidikan bulan November Desember 2020										
		1	2. Jumlah Penyenggaraan Penggerakan Hukum Keimigrasian berupa Operasi Mandiri	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	3 LHK Triwulan IV	TW1	1	LHK	0	0	Operasi mandiri bulan Mei	0	0								
							TW2	2	LHK	1	50	Operasi Mandiri belum terlaksana di bulan Juli, Agustus dan September 2020										
							TW3	0	LHK	0	0	Operasi Mandiri belum terlaksana di bulan Juli, Agustus dan September 2020										
							TW4	3	LHK	2	67	pelaksanaan operasi mandiri bulan Desember 2020										
		1	3. Jumlah Penyenggaraan Penggerakan Hukum Keimigrasian berupa Operasi Gabungan	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	2 LHK Triwulan IV	TW1	1	LHK	1	100	Operasi Gabungan Bulan Januari, Februari dan Maret 2020	0	0								
							TW2	0	LHK	0	0	Operasi Gabungan belum terlaksana di bulan Juli, Agustus dan September 2020										
							TW3	0	LHK	0	0	Operasi gabungan belum terlaksana di bulan Juli, Agustus dan September 2020										
							TW4	2	LHK	2	100	terlaksana sesuai target capaian dua kali pelaksanaan di Bulan Januari dan Desember 2020										
		1	4. Jumlah Penyenggaraan Penggerakan Hukum Keimigrasian berupa Pemberian TAC	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	2 LHK Triwulan IV	TW1	0	LHK	0	0	Belum ditemukan pelanggaran hukum periode bulan Januari sampai dengan Maret 2020	0	0								
							TW2	0	LHK	0	0	Belum ditemukan pelanggaran hukum keimigrasian periode bulan April sampai dengan Juni 2020										
							TW3	1	LHK	0	0	Belum ditemukan pelanggaran hukum keimigrasian periode bulan Juli sampai dengan Agustus 2020										
							TW4	2	LHK	0	0	tidak ditemukan pelanggaran hukum keimigrasian periode bulan Oktober s.d. Desember 2020										
1	5. Jumlah Penyenggaraan Penggerakan Hukum Keimigrasian berupa Deportasi	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1 LHK Triwulan IV	TW1	0	LHK	0	0	Belum ditemukan pelanggaran keimigrasian	0	0										
					TW2	0	LHK	0	0	Belum ditemukan pelanggaran keimigrasian												
					TW3	0	LHK	0	0	Belum ditemukan pelanggaran keimigrasian periode Juli s.d. Agustus 2020												
					TW4	1	LHK	0	0	tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian periode Bulan Oktober s.d. November 2020												
1	6. Jumlah Penyenggaraan Penggerakan Hukum Keimigrasian berupa Penerbitan TIMPORA	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	2 LHK Triwulan IV	TW1	1	LHK	1	100	Pelaksanaan TIMPORA bulan Maret 2020	0	0										
					TW2	0	LHK	0	0	Belum dilaksanakan kegiatan TIMPORA												
					TW3	2	LHK	2	100	Pelaksanaan TIMPORA tanggal 17 September 2020												
					TW4	0	LHK	0	0	kegiatan TIMPORA telah 100% dilaksanakan periode triwulan IV												
2.	Penyenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penggerak Hukum Keimigrasian di Wilayah	2	1. Jumlah Penyenggaraan Pelayanan Keimigrasian berupa Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	202 ORANG Triwulan IV	TW1	50	Orang	56	112	Pelaksanaan Penerbitan Pelayanan Keimigrasian berupa Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing	- 88Laporan Statistik Penerbitan Ijin Keimigrasian bagi WNI Tahun 2020.pdf	0	0							
							TW2	101	Orang	67	66	Sehubungan dengan pembatasan pelayanan Keimigrasian dikarenakan meredanya wabah covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan menerbitkan Dokum bagi WNA sebanyak 8 orang pada bulan April 2020, bulan Mei 2 orang, dan bulan Juni 1 orang.										
							TW3	152	Orang	89	59	Penerbitan dokum bagi WNA bulan Juli sebanyak 9 WNA, Penerbitan dokum bagi WNA bulan Agustus sebanyak 12 WNA, Penerbitan dokum bagi WNA bulan September sebanyak 7 orang										
							TW4	203	Orang	113	56	Periode Oktober sampai dengan November sebanyak 17 orang										
							TW1	793	Orang	971	122	Pelaksanaan Penerbitan Pelayanan Keimigrasian berupa Penerbitan Dokum bagi WNI bulan Januari, Februari dan Maret 2020				- 89Penerbitan Ijin Levis dan Utera bulan Juli dan Agustus 2020.pdf	0	0				
							TW2	1586	Orang	995	63	Terjadi dengan penyebaran wabah covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan Work from Home bagi ASN dan membatasi pelayanan Keimigrasian. Terkait hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan telah mengulangi penerbitan dokum kepada 24 orang pemohon Keimigrasian terhitung bulan dari April sampai dengan 30 Juni 2020										
							TW3	2379	Orang	1078	45	penerbitan dokum kepada 63 orang pemohon Keimigrasian terhitung bulan dari Juli sampai dengan September 2020										
							TW4	3173	Orang	1124	35	penerbitan dokum kepada 46 orang pemohon Keimigrasian terhitung bulan dari Oktober sampai dengan November 2020										
		2	3. Pemerkasaan Keimigrasian di TPI	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	631 ORANG Triwulan IV	TW1	158	Orang	9808	6208	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Udara sebanyak 7530 Bulan Januari dan Februari 2020, pemeriksaan Keimigrasian di TPI Laut 201 bulan Januari dan Februari dan Maret 2020	- 90Pemeriksaan TPI Levis dan Utera bulan Juli dan Agustus 2020.pdf	0	0							
							TW2	316	Orang	10079	3196	Sehubungan dengan meredanya wabah covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan sistem Lockdown dan PSBB pada sebagian wilayah Indonesia yang berdampak pada penurunan pemeriksaan keimigrasian di TPI Tanjungpandan baik penumpang maupun kru Kapal dan Pesawat										
							TW3	631	Orang	0	0	bulan Juli dan Agustus 2020										
							TW4	631	Orang	0	0	bulan Juli dan Agustus 2020										
							2	4. Layanan Dukungan Manajemen Satek	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1 Layanan Triwulan IV	TW1				0	Layanan	0	0	Akumulasi layanan diakhir tahun	0	0
												TW2				0	Layanan	0	0	Akumulasi layanan diakhir tahun		
												TW3				0	Layanan	0	0	Akumulasi layanan diakhir tahun 2020		
												TW4				1	Layanan	1	100	realisasi Layanan Dukungan Manajemen Satek selama 1 tahun		
2	5. Layanan Perkantoran	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1 Layanan Triwulan IV	TW1	0	Layanan	0	0	Akumulasi layanan diakhir tahun	0	0										
					TW2	0	Layanan	0	0	Akumulasi layanan diakhir tahun												
					TW3	0	Layanan	0	0	Akumulasi layanan diakhir tahun												
					TW4	1	Layanan	1	100	Realisasi Layanan Perkantoran selama 1 tahun tercapai												

Urutkan No



2020

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Tanjungpandan

Jl. Jenderal Sudirman Km. 6,5  
Tanjungpandan Telp. (0719) 22268  
Email : [kanim\\_tanjungpandan@imigrasi.go.id](mailto:kanim_tanjungpandan@imigrasi.go.id)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN  
Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5, Tanjung Pandan Telpun (0710) 22200 Fax. (0710) 22200  
E-mail : kanim\_tanjungpandan@imigrasi.go.id

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DEWANTO WISNU RAHARJO, S.H.  
NIP : 19720616 199303 1 001  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : EKO BUDIANTO, S.H.,M.Si.  
NIP : 19731118 199303 1 001  
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, Februari 2020

Pihak Kedua  
Kepala Divisi Keimigrasian

Eko Budianto, S.H.,M.Si.  
NIP. 19731118 199303 1 001



Pihak Pertama  
Kepala Kantor Imigrasi  
Dewanto Wisnu Raharjo, S.H.  
NIP-19720616 1009303 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN**  
Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5, Tanjung Pandan Telepon (0719) 22268 Fax. (0719) 22268  
E-mail : kanim\_tanjungpandan@imigrasi.go.id

### FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Satker : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan  
Tahun : 2020  
Program : Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian  
Hasil (Outcome) : 1. Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian  
2. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian  
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian

No.	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	22 LHK
			1. Penyelidikan Intelijen sebanyak : 12 LHK 2. Operasi Mandiri sebanyak : 3 LHK 3. Operasi Gabungan sebanyak : 2 LHK 4. Pemberian TAK sebanyak : 2 LHK 5. Penyelidikan sebanyak : 1 LHK 6. Koordinasi Tim PORA sebanyak : 2 LHK	
2			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	3.376 Orang
			1. Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing sebanyak : 203 Orang 2. Penerbitan Dokumen Keimigrasian WNI sebanyak : 3.173 Orang	
3			Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	631 Orang
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan		
5	Layanan Perkantoran	1 Layanan		


Kegiatan :

Penyelenggaraan Kegiatan Fungsi Pengkoordinasian,  
Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Kerja


Anggaran :

Rp. 4.766.282.000,-

PIHAK KEDUA  
Kepala Divisi Keimigrasian,

  
Eko Budianto, S.H., M.Si.  
NIP. 19731116 199303 1 001



  
Darwanto Wisnu Raharjo, S.H.  
NIP. 19720616 1009303 1 001